

**HAMBATAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
SMP NEGERI DI KECAMATAN PLAYEN DALAM PEMBERLAKUAN  
KURIKULUM 2013**

Oleh: Yudi Maryoto dan Anang Priyanto, M.Hum.  
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Yogyakarta

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hambatan yang dihadapi guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen dalam pemberlakuan Kurikulum 2013, (2) upaya yang dilakukan guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen untuk mengatasi hambatan dalam pemberlakuan Kurikulum 2013.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Diperoleh subjek penelitian sebanyak 5 (lima) orang guru PPKn. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, dan SMP Negeri 4 Playen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Analisis data dilakukan dengan cara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hambatan guru PPKn dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 digolongkan menjadi: (a) perencanaan pembelajaran yaitu guru mengalami kesulitan dalam penguasaan media pembelajaran, serta distribusi Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang terlambat. (b) Pelaksanaan pembelajaran yaitu guru mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, distribusi Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang terlambat, serta ketersediaan LCD Proyektor yang terbatas. (c) Penilaian pembelajaran yaitu guru mengalami kesulitan untuk menilai aspek hasil belajar peserta didik, guru mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu, serta banyaknya dokumen yang digunakan untuk penilaian. (2) Upaya guru PPKn untuk mengatasi hambatan dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 terdiri dari: (a) perencanaan pembelajaran yaitu berupa kerja sama dengan teman-teman sejawat, memanfaatkan internet untuk menambah wawasan tentang Kurikulum 2013, serta memperbanyak atau memfotokopi sendiri buku-buku Kurikulum 2013. (b) Pelaksanaan pembelajaran berupa pemberian penguatan partisipasi belajar, memperbanyak/memfotokopi sendiri buku-buku Kurikulum 2013, serta memperbanyak ketersediaan LCD Proyektor. (c) Penilaian pembelajaran yaitu pemanfaatan aplikasi penilaian Kurikulum 2013. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya tidak berlanjut seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Kata Kunci: *Hambatan, Guru PPKn, Kurikulum 2013*

**THE PANCASILA AND CIVIC EDUCATION TEACHER IN PLAYEN STATE  
JUNIOR HIGH SCHOOL'S HINDRANCE OF KURIKULUM 2013  
IMPLEMENTATION**

By: Yudi Maryoto and Anang Priyanto, M.Hum.  
Legals and Civic Education  
Social Faculty  
Yogyakarta State University

**ABSTRACT**

The research aims to described: (1) the Pancasila and Civic Education teacher in Playen State Junior High School's hindrance of Kurikulum 2013 Implementation, (2) the Pancasila and Civic Education teacher in Playen State Junior High School's effort to decreased the hindrance of Kurikulum 2013 Implementation.

The research was a qualitative descriptive. The subject determination method was purposive. The subject consisted of 5 (five) teachers. The research took place at SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, and SMP Negeri 4 Playen. The data collection method used interview and documentation with cross check as the data validation. The data analysis method used data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results showed that: (1) the Pancasila and Civic Education teacher in Playen State Junior High School's hindrances of Kurikulum 2013 implementation were classified in 3 (three) categories: (a) the hindrances of lesson plan process consisted of how to developed the learning media, and also a late distribution of Buku Guru and Buku Siswa. (b) The hindrances of learning process consisted of how to increased the student's learning participation, a late distribution of Buku Guru and Buku Siswa Kurikulum 2013, and a limitedness of LCD Projector supplies. (c) The hindrances of assessment process consisted of how to applied the student's assessment aspects, teacher's time management, and a lot of assessment documents. (2) The Pancasila and Civic Education teacher in Playen State Junior High School's efforts to decreased the hindrances of Kurikulum 2013 implementation were classified in 3 (three) categories: (a) to decreased the hindrances of lesson plan process consisted of to cooperated with other teachers, to improved the own ability with internet, to copied the books of Kurikulum 2013. (b) To decreased the hindrances of learning process consisted of to increased the student's learning participation, to copied the books of Kurikulum 2013, and to increased the LCD Projector supplies. (c) To decreased the hindrances of assessment process consisted of to produced the Kurikulum 2013 assessment application system. But, the efforts were unworking because of a Regulation of Education and Culture Ministry 160 of 2014 about Kurikulum Tahun 2006 and Kurikulum 2013 anactment.

*Key Words: Hindrance, PPKn Teacher, Kurikulum 2013*

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum memegang peranan yang penting dalam pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan, tanpa kurikulum yang sesuai akan sulit untuk mewujudkan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pendidikan yang demikian, maka perlu adanya kurikulum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kurikulum seharusnya mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, perubahan kurikulum merupakan hal yang pasti terjadi dalam rangka menyesuaikan kehidupan masyarakat yang dinamis dan kompleks tersebut.

Pada tahun ajaran 2013/2014 pendidikan Indonesia mendapat tantangan besar dengan lahirnya Kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksudkan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tahun 2006 atau lebih sering disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Munculnya kurikulum ini bersamaan dengan akan berakhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yang melahirkan pro dan kontra berbagai kalangan mengingat kurikulum tersebut terkesan dipaksakan pelaksanaannya.

Pergantian kurikulum sudah seharusnya memperhatikan pihak-pihak pelaksana kurikulum tersebut seperti guru, dan lain-lain. Guru merupakan komponen penting yang tidak bisa dianggap remeh keberadaannya khususnya dalam kurikulum. Bagaimana suatu kurikulum dapat berjalan optimal sedangkan guru kurang terlibat dalam implementasi kurikulum tersebut. Berbicara tentang kurikulum tentu tidak bisa lepas dari peran seorang guru. Setidaknya demikian menurut Oemar Hamalik (2006: 20-21) "...pada dasarnya betapapun baiknya suatu kurikulum, berhasil atau tidaknya akan sangat bergantung kepada tindakan-tindakan guru di sekolah dalam melaksanakan kurikulum itu." Ini berarti kerjasama yang baik antara guru dan kurikulum sangat diperlukan.

Sehubungan dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, salah satu pihak yang mengalami permasalahan adalah guru. Sebagaimana menurut Sudaryanto Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan dalam tulisannya *Ketidaksiapan Kurikulum 2013* seperti dimuat Kedaulatan Rakyat, Kamis 21 Agustus 2014 menggambarkan bagaimana kurikulum ini menemui berbagai permasalahan dalam pemberlakuannya: "...ada guru yang kekurangan jam mengajar terutama yang telah mengikuti sertifikasi, serta kendala lain seperti keterlambatan buku teks ke sekolah." Pada akhirnya peserta didik yang harus menanggung segala konsekuensi atas ketidaksiapan itu.

Pemberlakuan Kurikulum 2013 menemui permasalahan baru seiring pergantian era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ke era pemerintahan Kabinet Kerja. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menegaskan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang memberlakukan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun ajaran 2014/2015 agar kembali memberlakukan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun ajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari kementerian untuk memberlakukan Kurikulum 2013. Sementara itu, untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah memberlakukan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester diperbolehkan tetap memberlakukan Kurikulum 2013.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang terkena imbas dari peraturan menteri tersebut adalah Playen. Playen merupakan salah satu Kecamatan yang tidak mempunyai SMP rintisan penerapan Kurikulum 2013. Kecamatan Playen mempunyai 4 (empat) SMP Negeri yaitu SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, dan SMP Negeri 4 Playen. Sebagai sekolah negeri, seharusnya keempat SMP Negeri tersebut mampu memberlakukan Kurikulum 2013 sebagai konsekuensi atas kebijakan pemerintah yang dinaunginya. Seharusnya keempat SMP Negeri ini juga memiliki

kemudahan dalam melakukan koordinasi terkait Kurikulum 2013 dengan pemerintah. Sekiranya akan relevan jika sekolah negeri menjadi pelopor pemberlakuan Kurikulum 2013.

Pada semester pertama tahun ajaran 2014/2015 SMP Negeri di Kecamatan Playen ini memberlakukan Kurikulum 2013. Akan tetapi, seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 ini, SMP Negeri tersebut pada semester kedua tahun ajaran 2014/2015 berjalan kembali memberlakukan Kurikulum Tahun 2006. Pemberlakuan Kurikulum 2013 yang tidak lebih dari satu semester ini membawa kemungkinan besar bahwa guru belum dapat menerapkan Kurikulum 2013 dengan baik. Guru SMP Negeri di Kecamatan Playen termasuk guru PPKn dimungkinkan mengalami hambatan dalam memberlakukan Kurikulum 2013.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang Hambatan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri di Kecamatan Playen merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Sukardi (2005: 157) “...merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.” Sedangkan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Andi Prastowo, 2012: 22).

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2007: 299), “teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.” Pertimbangan dalam menentukan subjek penelitian adalah guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen yang telah mengikuti pelatihan pendidikan Kurikulum 2013 dan guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen yang pernah memberlakukan Kurikulum 2013 selama satu semester pada tahun ajaran 2014/2015.

Diperoleh subjek penelitian sebanyak 5 (lima) orang guru PPKn dengan rincian 2 (dua) orang guru PPKn SMP Negeri 1 Playen, 1 (satu) orang guru PPKn SMP Negeri 2 Playen, 1 (satu) orang guru PPKn SMP Negeri 3 Playen, dan 1 (satu) orang guru PPKn SMP Negeri 4 Playen.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, dan SMP Negeri 4 Playen. Waktu penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini guna mendapat data terkait hambatan guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 berlangsung pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Agar data yang diperoleh mempunyai keakuratan dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan *cross check*. *Cross check* dilakukan dengan cara mengecek hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis data yang memungkinkan data tersebut mudah untuk dipahami. Teknik analisis data yang dilakukan mencakup beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hambatan Guru PPKn dalam Pemberlakuan Kurikulum 2013**

#### **a. Hambatan dalam Perencanaan Pembelajaran PPKn**

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan guru sebagai pengelola pembelajaran dalam hal mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses menjelaskan perencanaan pembelajaran “...dirancang dalam bentuk Silabus dan RPP.” Silabus

Kurikulum 2013 dibentuk dan ditentukan langsung oleh pemerintah, sehingga dalam hal ini guru selama proses perencanaan pembelajaran hanya mempersiapkan RPP.

Pada awal diberlakukannya Kurikulum 2013 pada semester pertama tahun ajaran 2014/2015 semua guru PPKn sebenarnya telah mampu menyusun RPP. RPP yang disusun oleh guru PPKn dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Sistematika penyusunan RPP yang dibuat oleh guru PPKn meliputi komponen-komponen sebagaimana arahan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses. Akan tetapi, RPP yang telah disusun oleh guru PPKn diakui belum bervariasi dan belum dikembangkan lebih jauh. Diketahui bahwa dokumen RPP guru PPKn sebagian besar hanya memanfaatkan LCD Proyektor sebagai media pembelajarannya. Hal tersebut salah satunya dikarenakan guru mempunyai keterbatasan penguasaan terhadap media-media pembelajaran, khususnya yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Faktor lain yang menjadi penghambat guru PPKn dalam pengembangan RPP adalah distribusi buku penunjang pembelajaran (Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013) yang datang terlambat. Seluruh guru PPKn di SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, dan SMP Negeri 4 Playen mengeluhkan datangnya Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang terlambat sehingga proses pengembangan RPP dan pembelajaran di kelas menjadi tidak maksimal. Mengingat Kurikulum 2013 yang tergolong masih baru, ketersediaan sumber-sumber belajar untuk persekolahan dimungkinkan masih terbatas keberadaannya. Hal yang demikian menjadikan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 penting bagi guru PPKn. Kedua buku tersebut menjadi penting dikarenakan dalam buku tersebut terutama Buku Guru berisi langkah-langkah dalam pengembangan RPP. Selain itu kedua buku dapat dijadikan sebagai alternatif sumber belajar untuk memperkaya materi ajar.

### **b. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran PPKn**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi dari apa yang telah dipersiapkan guru selama perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 mempunyai model yang berbeda dengan kurikulum terdahulu, dimulai dari metode pembelajaran, posisi guru dan peserta didik selama pembelajaran, dan lain-lain. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Guru PPKn sebenarnya sudah mampu melaksanakan pembelajaran Kurikulum 2013. Akan tetapi, pelaksanaan pembelajaran masih sangat terbatas, sederhana dan terkesan seadanya. Pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif (*student center*) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal yang demikian menurut guru PPKn dikarenakan pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 masih terbatas.

Persoalan bagaimana membuat peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran sepertinya dihadapi hampir setiap guru, tidak terkecuali guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen. Hal tersebut dikarenakan peserta didik bersifat pasif selama pembelajaran ataupun karena peserta didik masih terbiasa dengan metode belajar dalam Kurikulum Tahun 2006, sehingga pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 seperti yang diharapkan belum terpenuhi secara optimal. Guru PPKn seringkali mengalami kesulitan untuk membuat peserta didik untuk mau bertanya, bahkan ada peserta didik yang tidur di dalam kelas, bersenda-gurau dengan temannya, dan lain-lain. Peserta didik belum terbiasa aktif dalam pembelajaran, terkadang ketika guru sudah berusaha memberi stimulus belajar, peserta didik tetap bersifat pasif.

Hasil penelitian juga ditemui bahwa ketersediaan beberapa sarana penunjang pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Playen yang terbatas menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan sebagai berikut.

...Proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu sarana yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 adalah buku. Pada kenyataannya distribusi Buku Guru dan Buku Siswa pada awal pembelajaran Kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kecamatan Playen terlambat. Kedua buku tersebut pada awal pembelajaran belum ada. Distribusi Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang terlambat menjadi salah satu faktor penghambat guru dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn Kurikulum 2013. Guru PPKn SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen, SMP Negeri 3 Playen, dan SMP Negeri 4 Playen mengeluhkan datangnya kedua buku tersebut yang terlambat sehingga pembelajaran di kelas menjadi tidak maksimal.

Sarana penunjang pembelajaran lain yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran adalah keberadaan LCD Proyektor. LCD Proyektor merupakan media yang seringkali dijumpai dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Teknologi LCD Proyektor sangatlah membantu dalam proses pembelajaran karena memudahkan semua pihak, baik guru maupun peserta didik. Kemampuan yang dimiliki LCD Proyektor dirasa cukup efektif dalam mendukung proses belajar *5M*, terutama dalam proses "*Mengamati*."

Namun, ketersediaan LCD Proyektor di SMP Negeri se-Kecamatan Playen masih terbatas dimana belum semua kelas mempunyai LCD Proyektor tersebut. Meskipun sebenarnya LCD Proyektor bukanlah media pembelajaran yang mutlak harus ada saat pelaksanaan pembelajaran, namun beberapa guru PPKn menganggap keberadaan LCD Proyektor menjadi penting mengingat kemampuan guru PPKn sendiri dalam menguasai media-media berbasis TIK masih terbatas sehingga belum memungkinkan untuk mengembangkan media-media pembelajaran yang lain.

### **c. Hambatan dalam Penilaian Pembelajaran PPKn**

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan sebagai berikut.

...Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assessment*) yang menilai kesiapan, proses, serta hasil secara utuh termasuk penilaian dalam mata pelajaran PPKn. Aspek hasil belajar yang dinilai meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setidaknya setiap pertemuan seorang guru akan menilai ketiga aspek sekaligus dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Banyaknya aspek hasil belajar yang harus dinilai tersebut dikeluhkan guru-guru PPKn. Sebagian besar guru PPKn menganggap bahwa untuk melakukan penilaian terhadap tiga aspek sekaligus pada setiap pembelajaran menjadi hambatan tersendiri.

Banyaknya aspek hasil belajar yang harus dinilai menyebabkan instrumen penilaian yang digunakan juga banyak. Jumlah instrumen yang banyak menyebabkan dokumen yang digunakan juga banyak. Banyaknya dokumen yang digunakan pasti berimplikasi

pada biaya besar yang akan digunakan juga. Hal yang demikian, diakui oleh beberapa guru PPKn seperti di SMP Negeri 2 Playen dan SMP Negeri 4 Playen menjadi salah satu hambatan selama melakukan penilaian pembelajaran PPKn Kurikulum 2013.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa guru PPKn menyertakan hambatan lain selain daripada telah disebutkan di atas. Bagi beberapa guru PPKn seperti di SMP Negeri 2 Playen dan SMP Negeri 4 Playen, persoalan pengaturan waktu menjadi salah satu hambatan tersendiri ketika melakukan penilaian pembelajaran. Proses penilaian yang rumit menyebabkan waktu guru sebagian besar terpakai untuk melakukan penilaian saja.

## **2. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemberlakuan Kurikulum 2013**

### **a. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Perencanaan Pembelajaran PPKn**

Bagi guru PPKn yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang Kurikulum 2013 mempunyai upaya internal dengan jalan bekerja sama dengan teman sejawat. Cara yang satu ini diambil oleh guru PPKn SMP Negeri 1 Playen dan guru PPKn SMP Negeri 2 Playen. Sementara itu, upaya yang ditunjukkan guru PPKn SMP Negeri 3 Playen yaitu dengan jalan mengikuti perkembangan Kurikulum 2013 melalui internet. Upaya yang demikian pada kenyataannya belum berjalan seperti yang diharapkan.

Untuk mengatasi persoalan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang belum ada di awal pembelajaran, guru PPKn SMP Negeri se-Kecamatan Playen memilih untuk memfotokopi/memperbanyak sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh guru PPKn SMP Negeri 1 Playen, mereka menggunakan dana BOS untuk memfotokopi buku yang selanjutnya digunakan untuk memfasilitasi setiap peserta didik dalam pembelajaran. Sementara hal yang hampir serupa juga ditunjukkan oleh guru PPKn SMP Negeri 3 Playen. Upaya untuk mengatasi persoalan distribusi buku ini dilakukan dengan cara memperbanyak buku paket untuk pegangan peserta didik dalam pembelajaran.

### **b. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran PPKn**

Upaya yang dilakukan guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen dalam rangka mengatasi kesulitan guru dalam membangkitkan partisipasi belajar peserta didik dengan upaya internal yaitu lebih pada memberi penguatan partisipasi belajar. Seperti yang ditunjukkan guru-guru PPKn SMP Negeri 1 Playen, SMP Negeri 2 Playen dan SMP Negeri 4 Playen, penguatan motivasi belajar peserta didik kebanyakan dilakukan dengan memberi stimulus-stimulus belajar seperti melempar pertanyaan kepada peserta didik, memberi sedikit *clue* jawaban yang kemudian diteruskan sendiri oleh peserta didik, diberi kesempatan untuk bertanya, membaca literatur-literatur, mengulangi jawaban teman, diberi *reward* bagi peserta didik yang aktif bertanya, dan lain-lain. Upaya lain yang dilakukan agar peserta didik terlibat lebih dalam pembelajaran berupa diskusi ataupun penugasan kepada peserta didik.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang belum ada di awal pembelajaran, guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen memilih upaya internal yang hampir serupa, yaitu dengan jalan memfotokopi/memperbanyak sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh guru PPKn SMP Negeri 1 Playen, dan guru PPKn SMP Negeri 3 Playen. Upaya untuk mengatasi persoalan distribusi buku ini dilakukan dengan cara memperbanyak buku paket untuk pegangan peserta didik dalam pembelajaran.

Bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan LCD Proyektor telah berupaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan berbagai cara. Upaya yang mana merupakan upaya eksternal bagi guru PPKn. Seperti ditunjukkan SMP Negeri 1 Playen yang menggelar rapat bersama komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik. Hal yang mana juga ditunjukkan oleh SMP Negeri 4 Playen. Sekolah tersebut juga telah berusaha

untuk menambah ketersediaan LCD Proyektor sehingga dimungkinkan semua kelas akan mempunyai LCD.

**c. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penilaian Pembelajaran PPKn**

Untuk mengatasi kesulitan dalam hal penilaian pembelajaran, guru PPKn menyertakan perihal upaya eksternal. Beberapa sekolah ditemui mampu membuat inovasi tentang penilaian Kurikulum 2013. Seperti yang dilakukan SMP Negeri 1 Playen dan SMP Negeri 2 Playen. Guru-guru PPKn kedua SMP tersebut mengaku bahwa peranan sekolah untuk mengatasi kesulitan guru selama melakukan penilaian dilakukan dengan cara membuat aplikasi penilaian Kurikulum 2013. Dari aplikasi sistem penilaian ini guru-guru PPKn dibimbing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan selama melakukan penilaian, serta diberi tips mudah mengelola penilaian pembelajaran yang efektif, dan lain-lain.

**SIMPULAN**

1. Hambatan yang dihadapi guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 terdiri dari sebagai berikut.
  - a. Hambatan dalam perencanaan pembelajaran PPKn yaitu guru mengalami kesulitan dalam menguasai media pembelajaran, serta distribusi Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang terlambat.
  - b. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn yaitu guru mengalami kesulitan dalam mengoordinasikan peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, distribusi Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 yang terlambat, serta ketersediaan LCD Proyektor yang terbatas.
  - c. Hambatan dalam penilaian pembelajaran PPKn yaitu guru mengalami kesulitan untuk menilai aspek-aspek hasil belajar peserta didik, guru mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu, serta banyaknya dokumen yang digunakan untuk penilaian.

2. Upaya yang dilakukan guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pemberlakuan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.
  - a. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam perencanaan pembelajaran PPKn yaitu berupa kerja sama dengan teman-teman sejawat, memanfaatkan internet untuk menambah wawasan tentang Kurikulum 2013, serta memperbanyak atau memfotokopi sendiri buku-buku Kurikulum 2013.
  - b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn yaitu berupa pemberian penguatan partisipasi belajar, memperbanyak/memfotokopi sendiri buku-buku Kurikulum 2013, serta memperbanyak ketersediaan LCD Proyektor.
  - c. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penilaian pembelajaran PPKn yaitu pemanfaatan aplikasi penilaian Kurikulum 2013.

Upaya-upaya sebagaimana dikemukakan di atas pada akhirnya tidak berlanjut seiring terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 yang mengharuskan SMP Negeri di Kecamatan Playen kembali memberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dikarenakan baru memberlakukan Kurikulum 2013 selama satu semester.

## **SARAN**

Berdasarkan simpulan mengenai hambatan guru PPKn SMP Negeri di Kecamatan Playen dalam Pemberlakuan Kurikulum 2013, peneliti mempunyai beberapa sumbang saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan yang membangun. Sumbang saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bagi Guru
  - a. Guru agar berkenan menyisihkan waktu luang guna dipergunakan sebaik mungkin untuk membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 yang telah didapatkan.

- b. Guru agar berkenan meluangkan waktu yang dimiliki untuk mengikuti seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga pemahaman terhadap Kurikulum 2013 semakin mendalam.
  - c. Guru agar berkenan meluangkan waktu untuk menambah *skill* dalam mengelola kondisi peserta didik sebagai upaya untuk menambah kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik.
2. Bagi Sekolah
- a. Sekolah sepatutnya memperhatikan dan memfasilitasi guru yang memberlakukan Kurikulum 2013.
  - b. Sekolah hendaknya mendirikan semacam tim kecil khusus bagi guru-guru yang menjalankan Kurikulum 2013. Hal tersebut sebagai upaya untuk wahana saling diskusi tentang Kurikulum 2013.
3. Bagi Penelitian Berikutnya
- Hasil penelitian belum dapat mengupas permasalahan yang diajukan secara menyeluruh, khususnya dalam hal penilaian pembelajaran sebagaimana dikeluhkan oleh kebanyakan guru yang memberlakukan Kurikulum 2013. Oleh karena itu, peneliti memberikan sumbang saran bagi penelitian berikutnya agar membahas dan mengembangkan penilaian pembelajaran Kurikulum 2013.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamalik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Sudaryanto. 2014. *Ketidaksiapan Kurikulum 2013*. Kedaulatan Rakyat. (Kamis 21 Agustus 2014).

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.